Receive : *01 November 2025*
Revised : *10 November 2025*
Accepted : *03 December 2025*

Jurnal ADMINISTRATOR
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.111
Vol. 7 No. 2, December 2025, Hlm. 155-166

Implementasi Digitalisasi Pemilihan Umum Di Kota Batam Dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)

Riska Amelia Putri, Linayati Lestari, Rahmayandi Mulda, Yustinus Farid Setyobudi, Ronald Parlindungan Hasibuan

Email : ***riskamelia363@gmail.com***

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

ABSTRAK

Pemilu merupakan pilar utama demokrasi yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pada Pemilu 2024 di Kota Batam, Komisi Pemilihan Umum menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai bentuk digitalisasi rekapitulasi suara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SIREKAP serta faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan kerangka Technology-Organization Environment (TOE) Framework. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi teknologi masih terdapat kendala berupa kesalahan pemindaian, gagal unggah dokumen, keterbatasan format PDF, serta sulitnya akses SIREKAP Web. Dari sisi organisasi, struktur formal dan budaya kerja KPU relatif jelas, tetapi rotasi petugas dan keterbatasan pelatihan membuat pemahaman teknis belum merata. Dari sisi lingkungan, regulasi seperti Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 memberikan dasar hukum, sementara pemanfaatan media sosial mendukung transparansi publik. Kesimpulannya, implementasi SIREKAP di Kota Batam belum berjalan optimal dan masih menghadapi hambatan teknis serta organisasi, sehingga diperlukan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kapasitas penyelenggara untuk memperkuat efektivitas, akurasi, dan kepercayaan.

Kata Kunci: Implementasi digitalisasi, KPU Kota Batam, Pemilu, SIREKAP

Receive : *01 November 2025*
Revised : *10 November 2025*
Accepted : *03 December 2025*

Jurnal ADMINISTRATOR
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.111
Vol. 7 No. 2, December 2025, Hlm. 155-166

ABSTRACT

Elections are a fundamental pillar of democracy that require transparency, accountability, and efficiency. In the 2024 General Election in Batam City, the General Election Commission implemented the Recapitulation Information System (SIREKAP) as a form of election digitalization. This study aims to analyze the implementation of SIREKAP and its influencing factors using the Technology-Organization-Environment (TOE) Framework. The research employed a descriptive qualitative method through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings show that from the technological aspect, challenges include scanning errors, failed uploads, PDF format limitations, and difficulties in accessing SIREKAP Web. From the organizational aspect, the formal structure and responsive work culture are relatively clear, but staff rotation and limited training result in uneven technical understanding. From the environmental aspect, regulations such as KPU Decree No. 66 of 2024 provide a strong legal foundation, while the use of social media supports public transparency. In conclusion, the implementation of SIREKAP in Batam City has not been fully optimal and still faces technical and organizational obstacles, thus requiring continuous evaluation and capacity building to strengthen effectiveness, accuracy, and public trust in digital recapitulation.

Keywords: Batam City, General Election, KPU Election digitalization, SIREKAP.

Receive : *01 November 2025*
Revised : *10 November 2025*
Accepted : *03 December 2025*

P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.111

LATAR BELAKANG

Transformasi digital di sektor publik menuntut pembaruan birokrasi agar lebih efisien, transparan, dan responsif. Teknologi kini menjadi kekuatan transformatif yang memengaruhi politik, demokrasi, dan manajemen publik, serta mendorong inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas layanan (Mannayong, 2024). Dalam konteks demokrasi, pemilu sebagai pilar utama membutuhkan transparansi dan kepercayaan publik. Salah satu inovasi digital untuk mendukung integritas pemilu adalah penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) oleh KPU, yang memastikan keterbukaan informasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Lukman, 2024).

Penelitian Lestari, Ahmad, & Solihin (2020) menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kinerja penyelenggara di tingkat kecamatan. Hal ini menunjukkan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan organisasi dalam mendukung penerapan inovasi digital seperti SIREKAP. Selain itu, Lestari, Pratiwi, & Fitriani (2024) mengkaji keterlibatan politik perempuan dalam Pemilu 2024, yang memperlihatkan bagaimana partisipasi masyarakat dapat diperkuat dengan dukungan teknologi digital untuk menjamin aksesibilitas dan transparansi.

Sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga Pemilu Serentak 2019, sistem kepemiluan Indonesia mengalami banyak perubahan (Sholahuddin, 2023). Pemilu 2024 menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya dilakukan secara serentak dalam memilih anggota legislatif, presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Hal ini menandai langkah maju dalam demokrasi Indonesia, namun juga membawa tantangan baru terkait integritas dan kualitas pemilu (Astuti, 2024). Di Kota Batam, jumlah pemilih mencapai 851.614 orang yang tersebar di 12 kecamatan dan 3.241 TPS, yang menghadirkan tantangan besar dalam memastikan akurasi dan kecepatan rekapitulasi suara (Keputusan KPU Batam Nomor 163 Tahun 2023).

Penggunaan SIREKAP dalam Pemilu 2024 juga menghadapi berbagai kendala. Laporan Netgrit menemukan adanya kesalahan teknis pada 19.170 TPS di seluruh Indonesia, termasuk 21 TPS di Kepulauan Riau, yang berdampak pada kecepatan dan akurasi rekapitulasi suara (Salabi, 2024). Selain itu, performa data SIREKAP menurun setelah hari kedua pemungutan suara; data yang masuk hanya 78% dibanding 92% pada Pilkada 2020 (Fitra, 2024). Hambatan lain meliputi server yang tidak stabil (Rahmawati, 2024), keterbatasan format

Receive : 01 November 2025
Revised : 10 November 2025
Accepted : 03 December 2025

P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.111

unggahan (Setiawan, 2024), serta error pada aplikasi mobile (Wiyoga, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi SIREKAP masih menghadapi berbagai kendala. Oktari Pakamase (2022) menemukan bahwa pada Pilkada 2020 di Kota Dumai, SIREKAP terkendala jaringan internet, perangkat, dan kapasitas server yang terbatas, ditambah minimnya pemahaman KPPS serta ketiadaan dasar hukum yang kuat. Sementara itu, Ica Angger Pradesa (2024) menyoroti Pemilu 2024 dengan fokus pada isu keamanan data, transparansi, serta integritas pemilu yang menuntut kolaborasi lintas aktor. Kedua penelitian ini memberikan gambaran tentang keterbatasan SIREKAP, namun belum secara spesifik menelaah implementasi pada konteks daerah tertentu dengan pendekatan yang komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui penerapan kerangka *Technology-Organization-Environment* (TOE) *Framework* dalam menganalisis implementasi SIREKAP pada Pemilu 2024 di Kota Batam. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan kendala teknis dan non-teknis serta analisis peran regulasi dan media sosial dalam mendukung digitalisasi pemilu di wilayah dengan karakteristik khusus, yaitu kota industri dan perbatasan. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi digitalisasi pemilu melalui SIREKAP di Kota Batam pada Pemilu 2024 ditinjau dari faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIREKAP dalam rekapitulasi suara di Kota Batam, mengeksplorasi kendala teknis dan non-teknis, menelaah koordinasi internal penyelenggara pemilu, serta menilai dukungan regulasi dan media sosial dalam proses digitalisasi pemilu. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pemilu digital yang lebih efektif, akurat, dan terpercaya di Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menyajikan data secara faktual dan akurat mengenai implementasi SIREKAP pada Pemilu 2024 di Kota Batam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terkait proses digitalisasi pemilu dalam konteks nyata (Sugiyono, 2017).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, observasi dilakukan selama proses rekapitulasi suara, sementara

Receive : *01 November 2025*
Revised : *10 November 2025*
Accepted : *03 December 2025*

P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.111

dokumentasi diperoleh dari pedoman teknis, laporan rekapitulasi, dan arsip internal KPU (Creswell, 2014).

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Analisis ini dipadukan dengan kerangka Technology-Organization-Environment (TOE) Framework untuk mengidentifikasi faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan yang memengaruhi implementasi digitalisasi pemilu melalui SIREKAP di Kota Batam.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIREKAP pada Pemilu 2024 di Kota Batam belum sepenuhnya optimal. Analisis berdasarkan kerangka Technology Organization-Environment (TOE) Framework memperlihatkan bahwa setiap faktor memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan maupun hambatan dalam digitalisasi pemilu.

1. Faktor Teknologi

Dari sisi teknologi, kendala utama terletak pada sistem aplikasi SIREKAP baik versi mobile maupun web. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain kesalahan pemindaian dokumen, kegagalan unggah berkas, keterbatasan format file yang hanya mendukung PDF, hingga gangguan pada server ketika beban tinggi. Hal ini menimbulkan keterlambatan rekapitulasi suara dan menambah beban kerja petugas.

Gambar 1
Server yang Tidak Bisa di Akses

Sumber : KPU Kota Batam

Gambar 1 memperlihatkan kondisi server SIREKAP yang tidak dapat diakses ketika proses rekapitulasi berlangsung. Gangguan server ini menyebabkan keterlambatan dalam pengunggahan data dari TPS, sehingga hasil perhitungan tidak bisa segera diproses ke tingkat berikutnya.

Gambar 2
Error Password

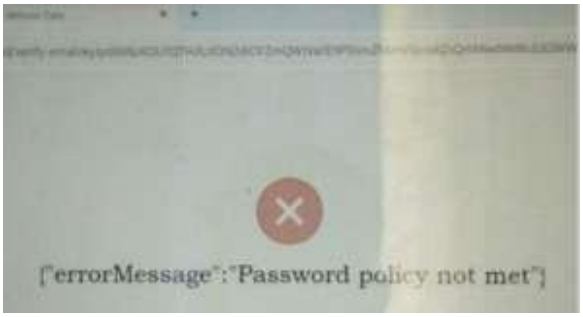

Sumber: KPU Kota Batam

Pada Gambar 2 terlihat kendala saat login aplikasi SIREKAP. *Error* ini dialami sejumlah petugas KPPS sehingga mereka tidak dapat segera

Receive : *01 November 2025*
Revised : *10 November 2025*
Accepted : *03 December 2025*

P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.111

menggunakan aplikasi, yang berdampak pada lambatnya proses input data

Gambar 3
Hanya Terdapat Pilihan *Logout* Pada Menu

Sumber: KPU Kota Batam

Gambar 3 menunjukkan menu aplikasi yang terbatas, di mana setelah error terjadi, hanya muncul opsi *Logout*. Kondisi ini membuat petugas tidak bisa melanjutkan proses, sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan pekerjaan

Gambar 4
***Username* Telah Terdaftar**

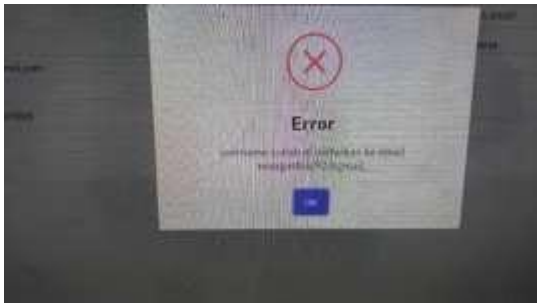

Sumber: KPU Kota Batam

Gambar 4 memperlihatkan adanya username ganda yang muncul dalam sistem, yang berpotensi menimbulkan kebingungan saat login. Kondisi ini menambah beban kerja petugas karena membutuhkan verifikasi manual

Gambar 5
Sertifikat Gagal

Sumber : KPU Kota Batam

Pada Gambar 5 terlihat kegagalan sertifikat saat login, yang membuat petugas tidak dapat mengakses aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknis juga berdampak pada efektivitas kerja organisasi penyelenggara pemilu.

Gambar 6
Unggah Berkas Hanya Bisa Format PDF

Sumber : Belajar SIREKAP

PDF memiliki keunggulan dari sisi keamanan dan konsistensi, tetapi ketergantungan eksklusif pada format ini menimbulkan kesulitan di lapangan, terutama bagi petugas yang kurang familiar dengan aplikasi digital. Perbedaan tingkat pemahaman

Receive : 01 November 2025
Revised : 10 November 2025
Accepted : 03 December 2025

P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.111

teknologi di antara petugas KPPS dan PPS turut memengaruhi efektivitas proses unggah, sebab dokumen yang gagal dikonversi atau berkualitas rendah akan ditolak oleh sistem, sehingga rekapitulasi harus diulang

Gambar 7
SIREKAP *Mobile* yang Salah Memindai Data

Sumber : KPU Kota Batam

Kendala teknis lainnya yang sering muncul pada proses pemindaian dan penyimpanan data. SIREKAP Mobile terkadang gagal membaca C.Hasil maupun *QR code* secara akurat, sehingga memerlukan verifikasi manual yang memakan waktu dan menambah beban kerja petugas

Gambar 8
SIREKAP Gagal Menyimpan Data

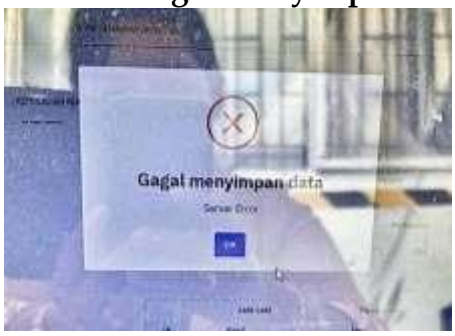

SIREKAP Web sering gagal menyimpan data akibat tingginya beban server pada saat penghitungan suara, sehingga aplikasi menjadi lambat atau tidak responsif. Kondisi ini memaksa petugas mengulang input data yang memakan waktu dan berpotensi menimbulkan kesalahan penghitungan

Gambar 9
SIREKAP Web Tidak Dapat Diakses

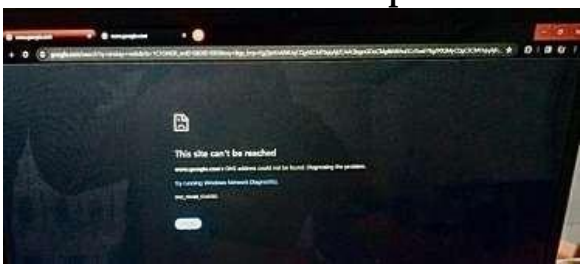

Sumber : KPU Kota Batam

Gangguan pada SIREKAP Web, seperti server yang tidak responsif saat beban tinggi, memaksa petugas mengulang input data atau menggunakan jalur alternatif melalui *WhatsApp Group*, terutama di lokasi dengan koneksi internet terbatas. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun SIREKAP menawarkan keunggulan relatif berupa percepatan dan digitalisasi rekapitulasi suara, efektivitas penggunaannya sangat tergantung pada keandalan sistem, kemudahan akses, dan kesiapan teknis petugas di lapangan

2. Faktor Organisasi

Faktor organisasi dalam implementasi SIREKAP di Kota Batam mencakup dua aspek utama, yaitu struktur organisasi dan budaya

Receive : 01 November 2025
Revised : 10 November 2025
Accepted : 03 December 2025
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.111

organisasi yang terbentuk di lingkungan penyelenggara pemilu. Dari sisi struktur organisasi, KPU Kota Batam memiliki jaringan hierarkis yang terdiri dari KPU di tingkat kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Struktur berlapis ini pada dasarnya dirancang untuk memastikan adanya pembagian tugas yang jelas dan alur koordinasi yang tertata dalam proses rekapitulasi suara. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur tersebut tidak selalu berjalan efektif.

Penyebab kendala implementasi SIREKAP salah satunya adalah praktik perollingan anggota penyelenggara. Petugas berpengalaman sering kali digantikan oleh anggota baru yang belum memahami mekanisme aplikasi, sehingga memicu kesenjangan kompetensi dan memperlambat adaptasi (Liputan 6, 2024). Akibatnya, sejumlah KPPS mengalami kesulitan mengoperasikan aplikasi, membuat dokumen PDF sesuai standar, serta melakukan unggahan tepat waktu (Wulandari, 2024).

Pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan KPU Kota Batam kepada petugas seharusnya mampu menjadi sarana transfer pengetahuan dalam struktur organisasi. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Beberapa peserta merasa materi yang diberikan kurang mendalam, sementara instruktur terkadang belum sepenuhnya menguasai jawaban atas kendala teknis yang ditanyakan. Hal ini menimbulkan kebingungan, terutama di tingkat KPPS yang menjadi ujung tombak penggunaan SIREKAP. Dengan demikian, efektivitas struktur organisasi dalam menyampaikan instruksi dan pengetahuan belum sepenuhnya optimal.

Dari sisi budaya organisasi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa KPU Kota Batam memiliki pola kerja yang relatif responsif dan fleksibel. Ketika terjadi hambatan teknis, misalnya server SIREKAP Web yang tidak dapat diakses, KPU segera menginstruksikan penggunaan jalur alternatif seperti pengiriman dokumen melalui aplikasi *WhatsApp Group*. Budaya kolaboratif juga tampak dari komunikasi informal yang intens antara KPU, PPK, PPS, dan KPPS, sehingga berbagai kendala dapat segera didiskusikan dan dicarikan solusinya. Budaya organisasi yang adaptif ini menjadi kekuatan tersendiri, karena menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan teknis dan sumber daya, penyelenggara di lapangan tetap berupaya menjaga kelancaran proses rekapitulasi.

Budaya organisasi yang adaptif ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi kelemahan dalam struktur formal. Perollingan anggota yang tidak disertai dengan mekanisme transfer pengetahuan yang sistematis tetap

Receive : 01 November 2025
Revised : 10 November 2025
Accepted : 03 December 2025

P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.111

menimbulkan hambatan signifikan. Begitu pula, respons cepat di lapangan terkadang bersifat ad hoc dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit dijadikan acuan pada penyelenggaraan berikutnya. Dengan demikian, faktor organisasi dalam implementasi SIREKAP di Kota Batam memperlihatkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh adanya struktur formal, tetapi juga oleh bagaimana budaya organisasi bekerja dalam praktik sehari-hari. Kombinasi antara struktur yang lebih terarah dan budaya organisasi yang adaptif menjadi kunci penting untuk memperkuat efektivitas implementasi digitalisasi pemilu.

3. Faktor Lingkungan

Regulasi, termasuk Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, UU Nomor 7 Tahun 2017 dan 2023, serta Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, memberikan legitimasi bagi penggunaan sistem digital dalam penghitungan suara. Regulasi ini memudahkan petugas mengikuti prosedur, mengurangi risiko kesalahan, dan memperkuat validitas data. Namun, kondisi sosial-ekonomi dan opini publik turut memengaruhi persepsi terhadap digitalisasi pemilu. Investasi besar yang dialokasikan untuk SIREKAP menghadapi kendala teknis dan operasional sehingga manfaatnya belum optimal, memaksa sebagian tahapan tetap dilakukan manual dan menimbulkan beban kerja ganda.

Dampak ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga memengaruhi produktivitas petugas, kepercayaan publik, dan legitimasi penyelenggara. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan tekanan eksternal mendorong adopsi teknologi, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada kesiapan teknis, kapasitas SDM, dan responsivitas organisasi di lapangan.

Pembahasan hasil penelitian ini menguatkan kerangka TOE, yang menekankan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan secara simultan. Hambatan teknis yang ditemukan mencerminkan pentingnya kemudahan penggunaan dan keandalan sistem dalam meningkatkan efektivitas digitalisasi pemilu. Faktor organisasi, terutama terkait rotasi petugas dan transfer pengetahuan, menunjukkan bahwa struktur formal saja tidak cukup; budaya responsif dan koordinasi efektif sangat diperlukan. Sedangkan faktor lingkungan menegaskan bahwa regulasi dan tekanan eksternal menjadi pendorong adopsi teknologi, tetapi kesiapan ekonomi, sosial, dan teknis menentukan sejauh mana manfaat dapat dirasakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa teknologi informasi dalam sektor publik memerlukan

Receive : 01 November 2025
Revised : 10 November 2025
Accepted : 03 December 2025

P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.111

integrasi yang baik antara sistem, manusia, dan konteks eksternal agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIREKAP di Kota Batam ditentukan oleh sinergi ketiga faktor TOE, di mana perbaikan sistem, pelatihan petugas, penguatan koordinasi organisasi, dan respons cepat terhadap kendala eksternal menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan legitimasi digitalisasi rekapitulasi suara.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi Digitalisasi Pemilihan Umum di Kota Batam dengan SIREKAP Tahun 2024 menggunakan TOE *Framework*, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem ini belum berjalan optimal. Dari sisi teknologi, SIREKAP berpotensi mempercepat rekapitulasi suara, tetapi masih terkendala kesalahan pemindaian formulir, kesulitan unggah dokumen, keterbatasan jaringan, hingga server yang tidak stabil. Dari sisi organisasi, keterbatasan pelatihan membuat pemahaman teknis tidak merata, sementara pergantian anggota KPU yang kurang memahami SIREKAP menghambat kesinambungan pengetahuan. Sementara itu, faktor lingkungan justru memberi dukungan positif melalui regulasi KPU RI dan transparansi informasi lewat media sosial yang meningkatkan kepercayaan publik.

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi penyelenggara pemilu dalam memperbaiki kesiapan teknologi dan penguatan kapasitas organisasi agar implementasi SIREKAP lebih optimal. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang penerapan TOE *Framework* dalam digitalisasi pemilu di Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A., Solihin, M., & Lestari, L. (2020). Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kecamatan Sagulung. *Jurnal Trias Politika, 4*(2), 238–249.

Ahmed, I. (2020). Technology organization environment framework in cloud computing. *Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control), 18*(2), 716–725.

Astuti, T., Ilmania, N. F., Muhibbin, M., & Suratman. (2024). Representasi penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 dalam prosedur pemilu yang bermutu dan berintegritas. *USM Law Review, 7*(2), 528–539.

Bwalya, K. J. (2017). *Handbook of research on e-government in emerging economies*. Hershey, PA: IGI Global.

Receive : *01 November 2025*
Revised : *10 November 2025*
Accepted : *03 December 2025*

P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.111

CNN Indonesia. (2024, May 29). KPU pakai SIREKAP di Pilkada 2024 meski banyak masalah di Pilpres. *CNN Indonesia*. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240529112934-32-1103256/kpupakai-sirekap-di-pilkada-2024-meski-banyak-masalah-di-pilpres

Creswell, J. W. (2015). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (A. Fawaid, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzia, Z., Darlisma, & Jasmalinda. (2024). Polemik pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, 18*(2), 158–165.

Fitra, S. (2024, March 7). Sederet masalah SIREKAP Pemilu 2024. *Katadata.co.id*. Retrieved from https://katadata.co.id/berita/nasional/65e83aa03668e/sederet-masalah-sirekap-pemilu-2024

Gurindam TV. (2024, February 15). Di TPS Batam dan SIREKAP suara Prabowo-Gibran, dari 120 jadi 880. *Gurindam TV*. Retrieved from https://gurindam.tv/ditps-batam-dan-sirekap-suara-prabowo-gibran-dari-120-jadi-880

KPU. (2024). *Belajar SIREKAP*. Retrieved from https://sirekap-tutorial.kpu.go.id/#pendahuluan

Lestari, L., Pratiwi, A., & Fitriani, D. (2024). Preparation for Indonesian election 2024: Women's participation in political contest. *Journal of Governance, 9*(2), 197–212.

Liputan6.com. (2024, February 20). Tugas KPU: Panduan lengkap peran dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum. *Liputan6.com*. Retrieved from https://www.liputan6.com/feeds/read/5784220/tugas-kpu-adalah-panduanlengkap-peran-dan-tanggung-jawab-komisi-pemilihan-umum

Lukman, J. P., & Sakir, R. R. (2024). Transformasi digital dalam administrasi publik: Peluang dan tantangan. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary, 2*(1), 1042–1049.

Mahirah, L. H., Sisilia, K., & Setyoeini, R. (2022). Analisis TOE memengaruhi adopsi media sosial untuk produk UMKM di Sentra Kreasi Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA), 6*(3), 176–194.

Mannayong, J., Rizal, M., Herling, & Faisal, M. (2024). Transformasi digital dan partisipasi masyarakat: Mewujudkan keterlibatan publik yang lebih aktif. *Jurnal Administrasi Publik, 20*(1), 1–12.

Natika, L. (2024). Transformasi pelayanan publik di era digital: Menuju pelayanan masa depan yang lebih baik. *The World of Public Administration Journal, 6*(1), 45–56.

Receive : *01 November 2025*
Revised : *10 November 2025*
Accepted : *03 December 2025*

P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.111

Rahmawati, A. (2024, February 17). Aplikasi SIREKAP error, penghitungan suara Pemilu di Kepri terkendala. *GoKepri.com*. Retrieved from https://gokepri.com/aplikasi-sirekap-error-penghitungan-suara-pemilu-di-kepriterkendala

Salabi, A. (2024, February 18). Tiga masalah SIREKAP di Pemilu 2024. *Rumah Pemilu*. Retrieved from https://rumahpemilu.org/tiga-masalah-sirekap-di-pemilu-2024

Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawan, Z. (2024, March 10). Cara download aplikasi SIREKAP di Pemilu 2024, lengkap panduan upload hasil penghitungan suara. *Pikiran Rakyat*. Retrieved from https://kepri.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2687715048/cara-downloadaplikasi-sirekap-di-pemilu-2024-lengkap-panduan-upload-hasil-penghitungansuara

Sholahuddin, A. H., *et al*. (2023). *Hukum pemilu di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.

Tornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). *The processes of technological innovation*. Lexington, MA: Lexington Books.

Wiyoga, P. (2024, February 19). Pemilu Kepri didera masalah data SIREKAP. *Kompas.id*. Retrieved from https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/19/pemilukepri-didera-masalah-data-sirekap-dan-pemungutan-suara-ulang

Wulandari. (2024, August 20). Panduan petunjuk penggunaan SIREKAP mobile KPPS Pemilu 2024. *Tirto.id*. Retrieved from https://tirto.id/panduan-petunjukpenggunaan-sirekap-mobile-kpps-pemilu-2024-gVxJ